

Ulama at the Epicenter of the Metropolis The Dialectic of KH. M. Thohir Bakri's Struggle in the Political Currents of Surabaya in the Mid-20th Century

Wildan Ainur Aditya
UIN Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dialektika perjuangan KH. M. Thohir Bakri dalam lanskap politik Surabaya sebagai episentrum metropolis pada paruh pertama abad ke-20. Sebagai ulama muda yang lahir di jantung kota heterogen, Thohir Bakri merepresentasikan sintesis antara identitas kesantrian tradisional dengan dinamika pergerakan urban. Penelitian ini menggunakan metode sejarah (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi) yang diintegrasikan dengan pendekatan sosiologis untuk membedah peran tokoh dalam struktur sosial masyarakat Surabaya yang kompleks. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjuangan Thohir Bakri merupakan manifestasi nilai kebangsaan yang adaptif, mencakup peran sebagai pendiri dan Ketua Pertama Ansor Nahdlatul Ulama (ANO), pemimpin NU Cabang Surabaya, Ketua Masyumi Surabaya, hingga Wakil Ketua Laskar Hizbullah Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Kiprah politiknya mencapai puncak nasional sebagai anggota Konstituante RI hasil Pemilu 1955. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Thohir Bakri berhasil menavigasi peran ulama di tengah arus modernitas politik kota besar, menjadikannya arsitek penting dalam mengintegrasikan nasionalisme santri ke dalam narasi pergerakan nasional di Surabaya.

Kata kunci: Surabaya, KH. M. Thohir Bakri, Nahdlatul Ulama, GP Ansor.

ABSTRACT

This article analyzes the dialectics of KH. M. Thohir Bakri's struggle within the political landscape of Surabaya as a metropolitan epicenter in the first half of the 20th century. As a young scholar born in the heart of a heterogeneous city, Thohir Bakri represents a synthesis between traditional santri identity and the dynamics of urban movements. This study employs the historical method (heuristics, criticism, interpretation, and historiography) integrated with a sociological approach to dissect the subject's role within the complex social structure of

Surabaya. Findings indicate that Thohir Bakri's struggle was an adaptive manifestation of national values, encompassing his roles as the founder and first Chairman of Ansor Nahdlatul Ulama (ANO), leader of the Surabaya Branch of NU, Chairman of Masyumi Surabaya, and Vice Commander of the Surabaya Hizbullah Army in defending independence. His political career reached a national peak as a member of the Indonesian Constituent Assembly following the 1955 Election. This study concludes that Thohir Bakri successfully navigated the role of a scholar amidst the currents of urban political modernity, establishing him as a significant architect in integrating santri nationalism into the narrative of the national movement in Surabaya.

Keywords: Surabaya, KH. M. Thohir Bakri, Nahdlatul Ulama, GP Ansor.

PENDAHULUAN

Surabaya pada awal abad ke-20 telah memantapkan posisinya sebagai kota metropolitan kedua di Hindia Belanda setelah Batavia.¹ Keberadaan pelabuhan yang strategis di ujung timur pantai utara Jawa menjadikannya sebagai pintu gerbang sirkulasi perdagangan internasional sekaligus titik temu berbagai etnis, mulai dari Bumiputra, Eropa, Cina, hingga Arab. Kondisi sosiologis yang heterogen ini menciptakan iklim intelektual dan politik yang dinamis, menjadikan Surabaya sebagai "dapur rekaman" bagi pergerakan nasional Indonesia. Di kota inilah, berbagai ideologi politik bersentuhan dan berdialektika, mulai dari kelompok nasionalis seperti Dr. Soetomo, kaum sosialis seperti Semaun, hingga para pemikir Islam seperti H.O.S. Cokroaminoto.²

Dalam arus politik metropolis yang dinamis tersebut, muncul kebutuhan bagi kalangan santri untuk merespons modernitas tanpa kehilangan identitas tradisionalnya. Berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya pada tahun 1926 merupakan salah satu momentum penting bagi kaum santri dalam melawan hegemoni sosial-politik kolonial. Di tengah transisi zaman ini, sosok KH. M. Thohir Bakri hadir sebagai representasi "Kiai Muda" yang memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa.³ Lahir di kampung

¹ Purnawan Basundoro, *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya: Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012)*, (Yogyakarta: Elmatara, 2012), 13.

² Siti Mimunah, *Kehidupan Keagamaan Masyarakat di Tengah Perubahan; Islam di Surabaya Akhir Abad XIX-Awal Abad XX*, (Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada, 2004), 11.

³ Wildan Ainur Aditiya, "Sejarah Perjuangan Politik Kebangsaan KH. M. Thohir Bakri 1934-1959", 1.

Ampel Masjid pada tahun 1907, Thohir Bakri adalah produk asli sosiologi Surabaya yang memahami betul denyut nadi masyarakat urban.

Dialektika perjuangan KH. M. Thohir Bakri mencakup spektrum yang luas, mulai dari jalur pendidikan hingga politik formal tingkat nasional. Beliau tercatat sebagai tokoh sentral yang membidani lahirnya *Ansor Nahdlatul Ulama* (ANO)—yang kini dikenal sebagai GP Ansor—pada tanggal 24 April 1934 dan ditetapkan sebagai Ketua Pertama organisasi tersebut.⁴ Di saat yang bersamaan, beliau memegang tanggung jawab sebagai Ketua Tanfidziyah NU Cabang Surabaya di usia yang masih sangat muda, yakni 26 tahun. Peran strategisnya semakin menguat melalui keterlibatan dalam jalur militer sebagai Wakil Ketua Laskar Hizbullah Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya pasca dicetuskannya Resolusi Jihad.⁵ Kiprahnya di tingkat nasional memuncak saat beliau terpilih menjadi anggota Konstituante RI Fraksi NU hasil Pemilu 1955.⁶

Meskipun memiliki peran krusial, narasi mengenai KH. M. Thohir Bakri sering kali kurang mendapat perhatian dalam historiografi arus utama dibandingkan tokoh-tokoh sezamannya. Hal ini disebabkan kurangnya sumber tertulis mengenai sosok KH. M. Thohir Bakri, oleh karena itu melalui proses wawancara kepada para narasumber yang memiliki hubungan kekerabatan kepada KH. M. Thohir Bakri diharapkan dapat menjadi sumber lisan dalam penyusunan historiografi mengenai KH. M. Thohir Bakri. Sumber lisan merupakan cara merekam masa silam melalui teknik wawancara atau interview. Teknik tersebut dipakai untuk menangkap corak dan jalinan pengalaman manusia yang dapat memperdalam pemahaman sejarawan mengenai peristiwa masa lalu, dengan mengorek informasi atau ingatan dari mereka yang pernah mengalami peristiwa masa lalu, atau pernah mendengar cerita mengenai peristiwa tersebut.⁷ Masih banyak dari kalangan akademisi maupun sejarawan yang meremehkan keberadaan sumber lisan, dan hanya menerima sumber tertulis sebagai acuan dalam historiografi. Berkenaan dengan ini, terdapat istilah yang sangat familiar di telinga para sejarawan, "no document no history", yang berarti tidak ada dokumen, tidak ada sejarah.

⁴ Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*, (Surabaya: Majalah Aula, 1990), 27.

⁵ Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarawan Tebuireng, *Resolusi Jihad "Perjuangan Ulama: dari Menegakkan Agama Hingga Negara"*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), 178.

⁶ Biodata Anggota Konstituante KH. Moh. Thohir Bakri dalam website www.konstituante.net. Beliau tercatat mewakili Fraksi NU nomor urut 167.

⁷ Usman Hadi, *Biografi K.H. Nawawi Bagor: Jejak Ulama Pejuang, dari Dakwah hingga Kemerdekaan* (Bantul: Filosofis Indonesia Press, 2025), 10.

Mereka yang memegang prinsip ini berpandangan bahwa keberadaan sumber tertulis merupakan kunci untuk menyibak misteri atas peristiwa yang terjadi masa silam.⁸ Sebagian besar literatur lebih banyak menyoroti biografi kiai yang menetap di pedesaan, sementara peran kiai di lingkungan urban metropolis seperti Surabaya masih menyisakan ruang kosong untuk diteliti secara mendalam. Kesenjangan inilah yang coba diisi oleh penelitian ini dengan menempatkan perjuangan KH. M. Thohir Bakri sebagai subjek analisis melalui metode sejarah yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manifestasi nilai-nilai kebangsaan yang diperjuangkan oleh Thohir Bakri mampu merespons tantangan zaman di tengah pusaran politik Indonesia yang kompleks.

PEMBAHASAN

Inkubasi Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan Madrasah

Perjuangan politik kebangsaan KH. M. Thohir Bakri berakar kuat pada ranah pendidikan, yang diyakininya sebagai instrumen paling fundamental untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan kesadaran merdeka bagi kaum Bumiputra.⁹ Baginya, madrasah bukan sekadar tempat transfer ilmu keagamaan secara tradisional, melainkan laboratorium persemaian nilai-nilai kebangsaan agar generasi muda mampu memahami pentingnya menjadi bangsa yang merdeka dari belenggu kolonialisme. Dedikasi ini diwujudkan secara nyata ketika beliau mengawali pengabdian sebagai guru di Madrasah NU Ranting Keputran, Surabaya, pada tahun 1928 di usia yang sangat muda, yakni 21 tahun. Selama tujuh tahun hingga 1935, beliau mengabdikan seluruh pikirannya untuk mencerdaskan santri urban di wilayah tersebut sekaligus menanamkan rasa cinta tanah air.

Eksistensi Thohir Bakri dalam dunia pendidikan semakin menguat seiring dengan peran kepemimpinannya di organisasi. Beliau menjadi aktor utama di balik berdirinya Madrasah NU Cabang Surabaya pada Agustus 1934. Menghadapi keterbatasan sarana operasional pada masa itu, beliau menunjukkan kecakapan manajerial dengan melakukan langkah diplomasi strategis bersama pengelola Madrasah Da'watus Syubban. Melalui serangkaian perundingan, beliau berhasil meyakinkan pihak Da'watus Syubban untuk menghibahkan berbagai perlengkapan

⁸ Ibid., 11

⁹ Wildan Ainur Aditiya, "Sejarah Perjuangan Politik Kebangsaan KH. M. Thohir Bakri 1934-1959", 52.

pendidikan, mulai dari meja, kursi, hingga papan tulis, guna mendukung keberlangsungan Madrasah NU Cabang Surabaya¹⁰.

Keteguhan beliau dalam menjaga kualitas pendidikan juga tercermin dari upaya pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar. Ketika jumlah siswa meningkat drastis, Thohir Bakri bersama pengurus NU Surabaya lainnya melakukan negosiasi intensif selama 40 hari dengan pengurus NU di Solo untuk mendatangkan bantuan guru. Ikhtiar ini membuahkan hasil dengan hadirnya ustadzah Siti Soedarmi untuk membantu proses belajar mengajar. Pada tahun 1935, Thohir Bakri secara resmi menggantikan posisi Siti Soedarmi dan melanjutkan tugas mengajar di Madrasah NU Surabaya selama delapan tahun hingga tahun 1943¹¹. Di lingkungan madrasah inilah, dimensi personal dan perjuangan beliau bertemu ketika beliau menemukan pendamping hidupnya, Siti Salmah, yang merupakan muridnya sendiri. Aktivitas kependidikan ini terpaksa terhenti pada tahun 1943 akibat instabilitas keamanan di bawah pendudukan Jepang, yang kemudian mendorong beliau untuk lebih fokus pada jalur perjuangan sosial-politik dan angkatan bersenjata.¹²

Arsitektur Gerakan Pemuda: Transformasi ANO (GP Ansor)

Arsitektur gerakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) yang dimanifestasikan melalui *Ansor Nahdlatul Ulama* (ANO) merupakan kristalisasi dari dialektika antara idealisme santri dengan kebutuhan organisasi modern di tengah arus pergerakan nasional¹³. Akar organisasi ini dapat ditarik dari inisiasi gerakan pemuda lokal seperti *Syubbanul Wathan* dan *Da'watus Syubban* pada tahun 1924, yang kemudian melebur menjadi *Nahdlatul Syubban* pada tahun 1930. KH. M. Thohir Bakri, yang telah memiliki visi tentang organisasi kepemudaan berseragam sejak masa nyantri di Tebuireng, menjadi aktor intelektual sekaligus organisatoris utama dalam proses transformasi ini¹⁴.

Momentum formalisasi organisasi terjadi pada Mukhtamar NU ke-IX di Banyuwangi, 24 April 1934, di mana ANO resmi ditetapkan dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda di bawah naungan NU. Pemilihan nama "Ansor" sendiri mengandung muatan teologis-historis yang mendalam, merujuk pada kaum Ansor di Madinah yang menjadi penolong perjuangan

¹⁰ *Ibid.*, 52-53.

¹¹ Isthohri dan tim penyusun, *Boekoe Peringatan, Riwayatnja Gerak dan Langkahnja Nahdlatul Ulama Tjabang Soerabaia Dalam Masa 10 Tahoen 1929-1939*, (Surabaya: NU Cabang Surabaya, 1940), 12.

¹² Saifullah Ma'shum dan tim penulis, *Menapak Jejak Mengenal Watak; Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994), 251.

¹³ Wildan Ainur Aditiya, "Sejarah Perjuangan Politik Kebangsaan KH. M. Thohir Bakri 1934-1959", 61.

¹⁴ Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*, (Surabaya: Majalah Aula, 1990), 12.

Nabi Muhammad SAW, sebuah identitas yang diusulkan setelah berkonsultasi dengan KH. Abdul Wahab Hasbullah. Pada tahap awal ini, Thohir Bakri tidak hanya berperan sebagai inisiator, tetapi juga langsung dipercaya memimpin organisasi sebagai Ketua (*President*) pertama¹⁵.

Guna memperkuat fondasi organisatoris, sebuah komisi dibentuk pada Mukhtamar NU ke-X di Solo (1935) untuk menyusun *Reglement* atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Thohir Bakri, bersama tokoh-tokoh seperti KH. Mahfudz Siddiq dan KH. Abdullah Ubaid, bekerja intensif untuk merumuskan struktur kepengurusan pusat (*Hoofd Bestuur*) yang lebih profesional. Hasilnya, pada Februari 1936, PNU secara resmi mengesahkan susunan pengurus besar ANO dengan Thohir Bakri sebagai pimpinan tertinggi, yang menandai dimulainya ekspansi gerakan secara masif ke berbagai daerah di Indonesia¹⁶.

Karakteristik unik dari arsitektur gerakan ANO di bawah Thohir Bakri adalah keberaniannya melakukan modernisasi simbolik melalui penggunaan atribut organisasi yang progresif. Beliau memperkenalkan seragam kuning, dasi hijau, peci hitam, serta pembentukan barisan drum band yang dikenal sebagai BANOE (*Barisan Ansor Nahdlatol Oelama*)¹⁷. Inovasi ini memicu perdebatan sengit dalam Mukhtamar NU ke-XI di Banjarmasin dan Mukhtamar ke-XII di Malang, di mana sejumlah kiai senior mempersoalkan atribut dasi dan trompet sebagai bentuk *tasyabbuh* (menyerupai kaum kafir/Barat)¹⁸. Meskipun menghadapi kritik tajam, Thohir Bakri dengan semangat kemudaannya tetap teguh mempertahankan visi modernitas tersebut sebagai strategi untuk membangun kebanggaan dan identitas nasionalisme di kalangan santri urban, sehingga ANO bertransformasi menjadi organisasi kepemudaan Islam yang paling dinamis pada masanya.

Kepemimpinan Organisasi dan Perjuangan Bersenjata di Surabaya

Eksistensi dan Independensi Kepemimpinan di NU Cabang Surabaya

Manifestasi kepemimpinan KH. M. Thohir Bakri di level lokal mencapai titik krusial ketika beliau dipercaya menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah NU Cabang Surabaya pada tahun 1933. Penunjukan ini tergolong fenomenal dalam struktur sosiologis Nahdlatul Ulama saat itu,

¹⁵ Ma'shum, dan tim, *Menapak Jejak Mengenal Watak...*, 246.

¹⁶ Wildan Ainur Aditiya, "Sejarah Perjuangan Politik Kebangsaan KH. M. Thohir Bakri 1934-1959", 64.

¹⁷ Ma'shum, dan tim, *Menapak Jejak Mengenal Watak...*, 251. BANOE kini dikenal sebagai BANSER (Barisan Ansor Serbaguna).

¹⁸ Perdebatan sengit melibatkan KH. Moh. Noer dari PBNU dan KH. R. Asnawi Kudus.

mengingat beliau mengemban amanah tersebut di usia yang sangat muda, yakni 26 tahun, menggantikan saudara Abdulaziz yang wafat. Di bawah kepemimpinannya yang berlangsung hingga sekitar tahun 1950, NU Surabaya menunjukkan dinamika perkembangan yang progresif dan mandiri.

Salah satu kebijakan strategis yang mencerminkan upaya independensi administratif adalah keputusan untuk memisahkan kantor NU Cabang Surabaya dari kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pada Juli 1934, Thohir Bakri memutuskan agar NU Surabaya mengontrak rumah sendiri sebagai pusat pergerakan cabang, sebuah langkah berani untuk memperkuat identitas organisasi di tingkat lokal. Selain pembenahan internal, beliau menunjukkan totalitas perjuangan melalui ekspansi organisasi ke wilayah terluar Surabaya, yakni Pulau Bawean, pada tahun 1934. Bersama delegasi kiai lainnya, beliau menempuh perjalanan laut untuk meresmikan 12 ranting NU di Bawean dalam waktu yang singkat¹⁹, yang menunjukkan kecakapan mobilisasi massa di lingkungan santri. Kedekatan sosiologis beliau dengan tokoh-tokoh nasionalis di Surabaya, seperti Dr. Sutomo dan Ruslan Abdul Gani, semakin memantapkan posisi beliau sebagai ulama muda yang memiliki wawasan kebangsaan luas di episentrum metropolis.

Mobilisasi Militer Santri: Masyumi dan Laskar Hizbullah Surabaya

Peran KH. M. Thohir Bakri dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan bermanifestasi melalui struktur formal organisasi Islam pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1944, di usia 37 tahun, beliau menjabat sebagai Ketua Masyumi Surabaya. Dalam kapasitas ini, beliau memegang peranan strategis dalam menyiapkan embrio kekuatan militer santri dengan mengirimkan 10 pemuda dari Karesidenan Surabaya untuk mengikuti pelatihan kader atau instruktur Hizbullah di Cibarus, Bogor, selama tiga bulan. Para alumni pelatihan inilah yang kemudian menjadi tulang punggung pembentukan Pasukan Hizbullah di wilayah Surabaya pasca-proklamasi.

Pasca Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dialektika perjuangan beliau beralih sepenuhnya pada jalur bersenjata guna menghadapi agresi sekutu. Dalam struktur Laskar Hizbullah Surabaya yang bermarkas di Jalan Kepanjen, KH. M. Thohir Bakri ditetapkan sebagai Wakil Ketua (Ketua I) mendampingi KH. Abdannafik sebagai Ketua Umum.²⁰ Beliau terlibat aktif dalam

¹⁹ Istohri dan tim, *Boekoe Peringatan, Riwayatnja Gerak dan Langkahnja Nahdlatoel Oelama Tjabang Soerabaia...*, 11

²⁰ Dokumen Museum NU Surabaya berjudul "Angkatan Darat TNI Batalyon INF 203 X Hizbullah Surabaya", 8.

mobilisasi umum pada 2 Oktober 1945, yang menghimpun pemuda dari berbagai organisasi seperti GPII, ANO, dan Hizbul Wathan untuk bergabung dalam barisan Hizbullah.

Kepemimpinan beliau di medan laga semakin krusial menyusul dicetuskannya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 oleh Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. Thohir Bakri berperan langsung dalam mempersiapkan mental dan fisik pasukan santri, termasuk mengoordinasikan pembagian senjata hasil rampasan dari tentara Jepang untuk menghadapi pasukan Sekutu dan Belanda²¹. Keterlibatan aktif beliau sebagai pimpinan laskar hingga meletusnya Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menegaskan bahwa bagi Thohir Bakri, mempertahankan kedaulatan negara merupakan kewajiban religius yang bersifat *fardhu 'ain*.

Konsistensi Politik di Kursi Konstituante RI

Kiprah politik formal KH. M. Thohir Bakri mencapai puncaknya pada level nasional ketika beliau terpilih sebagai anggota Konstituante Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum tahun 1955.²² Sebagai representasi dari Partai Nahdlatul Ulama (NU) yang berhasil meraih 91 kursi secara nasional, Thohir Bakri menempati posisi strategis dalam lembaga yang bertugas menyusun konstitusi baru bagi kedaulatan negara Indonesia guna menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.²³ Persidangan yang berlangsung di Gedung Asia-Afrika, Bandung, sejak November 1956, menjadi panggung dialektika ideologis yang tajam, di mana beliau terlibat aktif dalam perdebatan mengenai dasar negara antara kelompok yang mengusung nilai-nilai Islam dengan pendukung Pancasila.²⁴

Aspek yang menonjol dari integritas politik Thohir Bakri selama masa jabatan ini adalah pilihannya untuk tetap bertempat tinggal di Surabaya. Berbeda dengan mayoritas rekan sejawatnya yang memilih untuk hijrah ke Jakarta demi kedekatan dengan pusat kekuasaan, beliau tetap memilih menetap di kampung Praban, Surabaya.²⁵ Keputusan ini didasari oleh rasa tanggung jawab moral yang besar terhadap konstituennya serta komitmen untuk tetap mengawal denyut nadi organisasi di daerah, khususnya sebagai Ketua NU Cabang Surabaya.²⁶ Setiap harinya, beliau tetap menjalankan rutinitas sebagai Kepala KUA Surabaya dengan

²¹ HM. Sholeh Hayat dan Tim Penyusun Buku PWNU Jatim, *Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan*, (Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 1995), 60.

²² *Ibid.*, 60.

²³ Wildan Ainur Aditiya, "Sejarah Perjuangan Politik Kebangsaan KH. M. Thohir Bakri 1934-1959", 76 dan 79.

²⁴ *Ibid.*, 96-97.

²⁵ *Ibid.*, 51 dan 70.

²⁶ Penjelasan mengenai tanggung jawab moral di Surabaya didapatkan melalui wawancara dengan putra tokoh, Bapak Saiful Qudus.

bersepeda, kemudian melanjutkan tugas-tugas organisatoris di kantor NU, sebelum berangkat ke Bandung untuk mengikuti jadwal persidangan konstituante.²⁷

Loyalitas dan asketisme politik Thohir Bakri semakin teruji ketika beliau ditawarkan jabatan sebagai Menteri Agama untuk menggantikan posisi KH. Wahid Hasyim.²⁸ Secara halus, beliau menolak tawaran prestisius tersebut dengan alasan masih mengemban amanah rakyat sebagai anggota Konstituante yang tugasnya menyusun undang-undang dasar belum tuntas. Hal ini merefleksikan karakter beliau yang rendah hati dan tidak ambisius terhadap jabatan eksekutif, serta lebih mengutamakan tugas konstitusional yang bersifat fundamental bagi masa depan bangsa.²⁹

Hingga akhir hayatnya pada tahun 1959, konsistensi beliau dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan tidak pernah surut meskipun kondisi kesehatannya kian menurun akibat penyakit batu ginjal. Beliau tetap intens mengikuti perkembangan rapat-rapat di Konstituante hingga napas terakhirnya pada 26 Juli 1959.³⁰ Perjuangan Thohir Bakri di kursi Konstituante menjadi bukti nyata bahwa politik bagi beliau adalah sarana pengabdian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai kesantrian dan integritas personal, yang senantiasa menempatkan kepentingan umat dan bangsa di atas kepentingan pribadi.³¹

KESIMPULAN

Rekonstruksi sejarah perjuangan KH. M. Thohir Bakri dalam rentang waktu 1934 hingga 1959 memberikan gambaran komprehensif mengenai dialektika antara identitas kesantrian tradisional dengan tuntutan modernitas politik di episentrum metropolis Surabaya. Sebagai sosok yang lahir di jantung kota heterogen pada tahun 1907, Thohir Bakri merepresentasikan sintesis unik dari pendidikan pesantren yang mendalam —di bawah bimbingan tokoh sekaliber Syaikhona Kholil Bangkalan dan Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari— dengan ketajaman analisis terhadap dinamika masyarakat urban. Perjuangan beliau tidak bermanifestasi secara tunggal,

²⁷ Rutinitas bersepeda ke kantor KUA di Jalan Rajawali menunjukkan sisi kesahajaan tokoh di tengah jabatan nasionalnya.

²⁸ Ma'shum, dan tim, *Menapak Jejak Mengenal Watak...*, 263.

²⁹ Sifat tidak ambisius ini menjadi catatan khusus dalam biografi politik beliau.

³⁰ Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 286.

³¹ Kesimpulan mengenai komitmen beliau yang tidak goyah sedikitpun hingga akhir hayat.

melainkan melalui arsitektur gerakan yang multidimensional, dimulai dari jalur pendidikan sebagai inkubator nasionalisme di madrasah-madrasah Surabaya yang bertujuan menanamkan kesadaran merdeka bagi kaum Bumiputra.

Transformasi gerakan pemuda Islam menjadi salah satu legasi monumental beliau, di mana Thohir Bakri bertindak sebagai arsitek intelektual sekaligus organisatoris di balik berdirinya *Ansor Nahdlatul Oelama* (ANO) pada 24 April 1934 dan dipercaya menjabat sebagai Ketua Pertama. Kepemimpinan beliau di ANO menunjukkan keberanian luar biasa dalam melakukan modernisasi simbolik melalui atribut organisasi yang progresif, sebuah langkah strategi adaptasi untuk membangun kebanggaan identitas santri di tengah arus pergerakan nasional,. Sejalan dengan itu, peran beliau sebagai Ketua Tanfidziyah NU Cabang Surabaya selama kurang lebih 17 tahun mempertegas kapasitas beliau dalam mengonsolidasikan kekuatan umat di tingkat lokal dengan kemandirian administratif yang kuat.

Keterlibatan Thohir Bakri dalam mempertahankan kedaulatan negara mencapai titik krusial melalui jalur militer dan sosial-politik sebagai Ketua Masyumi Surabaya dan Wakil Ketua Laskar Hizbullah Surabaya. Mobilisasi massa dan kesiapan fisik pasukan santri di bawah komando beliau pasca-Resolusi Jihad menjadi bukti nyata bahwa bagi Thohir Bakri, mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban religius yang mutlak,. Puncak dedikasi politik beliau terukir di tingkat nasional sebagai anggota Konstituante RI hasil Pemilu 1955, di mana integritas beliau tetap teguh dengan memilih untuk tetap menetap di Surabaya demi mengawal konstituen daerah serta menunjukkan sikap asketis dengan menolak tawaran jabatan menteri demi menuntaskan amanat konstitusional.

Secara keseluruhan, sintesis dari sejarah perjuangan ini menegaskan bahwa KH. M. Thohir Bakri adalah seorang organisatoris ulung dan ulama pejuang yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam setiap sendi pengabdianya. Komitmen beliau yang tidak goyah sedikit pun, mulai dari memegang kapur di madrasah hingga merumuskan undang-undang dasar di meja legislatif, menjadikannya figur teladan dalam sejarah peradaban Islam dan nasional Indonesia hingga akhir hayatnya pada tahun 1959. Legasi perjuangan beliau yang kini diteruskan melalui GP Ansor menjadi bukti hidup akan keberhasilan visi politik kebangsaan yang beliau rintis di Kota Pahlawan.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Choirul. *Gerak Langkah Pemuda Ansor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*. Surabaya: Majalah Aula, 1990.

Basundoro, Purnawan. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya: Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012)*. Yogyakarta: Elmatra, 2012.

Bustami, Abdul Latif dan Tim Sejarawan Tebuireng. *Resolusi Jihad "Perjuangan Ulama: dari Menegakkan Agama Hingga Negara"*. Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015.

Fadeli, Soelaiman dan Mohammad Subhan. *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*. Surabaya: Khalista, 2007.

Hadi, Usman. *Biografi K.H. Nawawi Bagor: Jejak Ulama Pejuang, dari Dakwah hingga Kemerdekaan*. Bantul: Filosofis Indonesia Press, 2025.

Hayat, HM. Sholeh dan Tim Penyusun Buku PWNU Jatim. *Peranan Ulama dalam Perjuangan Kemerdekaan*. Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, 1995.

Isthohri dan tim penyusun. *Boekoe Peringatan, Riwayatnja Gerak dan Langkahnja Nahdlatuol Oelama Tjabang Soerabaia Dalam Masa 10 Tahoen 1929-1939*. Surabaya: NU Cabang Surabaya, 1940.

Ma'shum, Saifullah dan Tim Penulis. *Menapak Jejak Mengenal Watak; Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994..

Arsip

Dokumen Museum NU Surabaya. *Angkatan Darat TNI Batalyon INF 203 X Hizbullah Surabaya*.

Koleksi Museum NU Surabaya.

Skripsi

Aditiya, Wildan Ainur. "Sejarah Perjuangan Politik Kebangsaan KH. M. Thohir Bakri 1934-1959". Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Mimunah, Siti. *Kehidupan keagamaan masyarakat di tengah perubahan; Islam di Surabaya Akhir Abad XIX-Awal Abad XX*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada, 2004.